

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
(RENJA)
TAHUN 2025**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Rasakunda Pangkalpinang Telp. (0717) 431476

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : / KEP / KESBANGPOL / V / 2025

T E N T A N G

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan perlu disusun Rencana Kerja (RENJA);
- b. bahwa RENJA sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat II Sumatera Selatan sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 64020);
6. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

14.

Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 05);
15.

Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinanag Tahun 2023);
16.

Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penjabaran RKPD Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 Nomor 277); Tanggal 27 Mei 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU

Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KEDUA

Tugas Panitia Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua bertugas menghimpun seluruh data dan menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah Tahun 2025 sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja sebagai Pengguna Anggaran
- KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun 2025
- KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal Mei 2025

KEPALA KEPALA BADAN KESBANGPOL
KOTA PANGKALPINANG

DONAL TAMPUBOLON.AP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750522 199311 1 0

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : / KEP/KESBANGPOL/ V / 2025
TANGGAL : Mei 2025

1. Penanggungjawab : Kepala Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang
2. Ketua : Sekretaris Kesbangpol Kota Pangkalpinang
4. Sekretaris : Analisis Anggaran dan Keuangan
5. Anggota :
 1. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
 2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
 3. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ekonomi
 4. Petugas Penunjang Kegiatan Kantor / Lapangan

KEPALA BADAN KESBANGPOL
KOTA PANGKALPINANG

DONAL TAMPUBOLON.AP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750522 199311 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penyusunan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA	8
2.1 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	8
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu Capaian Renstra SKPD.....	9
2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD.....	11
BAB III TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN	13
3.1 Tujuan dan Sasaran.....	13
3.2 Program dan Kegiatan.....	14
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	20
BAB V PENUTUP	45

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dan Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya, aparatur di Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang diberikan pengetahuan dan kemampuan untuk mengemban dan melaksanakan tugas serta tanggungjawab dalam penyusunan Rencana Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 -2026.

Sebagaimana kita ketahui bersama, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang melalui berbagai kegiatan tahunan. Rancangan Rencana Kinerja Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang tahun 2024 - 2026 menguraikan program, rencana kegiatan dan sasaran tahunan berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya dalam rangka mencapai tujuan dan misi.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang tahun 2024 -2026 merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean and good governance*) serta berorientasi kepada hasil (*result oriented*) sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rancangan Rencana Kerja Perubahan I Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun 2024 -2026 ini pada dasarnya merupakan representasi tugas pokok dan fungsi SKPD. Berkenaan dengan itu, sebagaimana konsep manajemen pemerintahan, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta profesional dalam hal perencanaan kinerja dan penganggaran.

Akhir kata, semoga dokumen Rancangan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang tahun 2024 -2026 ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kinerja dan diharapkan mampu memberikan manfaat serta dampak positif bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara informasi, evaluasi maupun sebagai parameter dalam peningkatan kinerja organisasi. bahwa dokumen ini belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, saran dan masukan yang konstruktif untuk melaksanakan tugas di masa mendatang sangat diharapkan.

PANGKALPINANG, Mei 2025

**KEPALA BADAN KESBANGPOL
KOTA PANGKALPINANG**

DONAL TAMPUBOLON,AP.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19750522 199311 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah Kota Pangkalpinang yang digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja, target, dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun berpedoman kepada Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2025 dan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025.

Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Untuk itu dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta menjamin efektifitas dan efesiensi perencanaan di Kota Pangkalpinang, sehingga dapat menghasilkan Renja Perangkat Daerah yang berkualitas, diperlukan Pedoman Penyusunan Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kinerja (Renja) Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun 2025 merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean and good governance*) serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rancangan Rencana Kerja Awal Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ini pun pada dasarnya merupakan representasi tugas pokok dan fungsi SKPD. Berkenaan dengan itu, sebagaimana konsep manajemen pemerintahan, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta profesional dalam hal perencanaan kinerja dan penganggaran. Dalam aplikasinya, penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan I Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ini

merupakan wujud pertanggungjawaban dan pengejawantahan semangat reformasi birokrasi yang menghendaki pencapaian maksimal dalam etos kerja.

Rancangan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun tersebut. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategik akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi misinya.

Sedangkan sasaran tahunan, ditetapkan setiap tahun yang disesuaikan dengan kondisi eksisting di internal Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang terutama dalam rangka mengakomodir kebutuhan pihak-pihak terkait dalam hal ini yang dijadikan sebagai kelompok sasaran baik organisasi Pemerintah Kota Pangkalpinang sendiri maupun masyarakat dalam rangka meningkatkan manajemen operasionalnya.

Sebagai dokumen rencana tahunan satuan kerja perangkat daerah, Renja Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan dalam Renstra sesuai arahan dalam RKPD;
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA tahun 2025;
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam rencana kinerja tahunan sebagai wujud dari kinerja satuan perangkat daerah pada tahun 2025;

Dalam tataran teknisnya, RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2025 merupakan salah satu bagian dokumen perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam pembuatan dokumen perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kota Pangkalpinang tahun terkait. RKPD inilah yang menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan umum APBD serta prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) yang selanjutnya menjadi dokumen anggaran dalam bentuk APBD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55837), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
15. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 05);
16. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023);
17. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penjabaran RKPD Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 Nomor 277); Tanggal 27 Mei 2025;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 *Maksud*

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun 2025 dimaksudkan sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun tersebut, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang.

1.3.2 *Tujuan*

Tujuan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun 2025 adalah :

- 1) Memberikan kerangka operasionalisasi arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang berisi sasaran dan kebijakan daerah serta memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat

pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran;

- 2) Mewadahi aspirasi *stakeholder* dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dan kesempatan lainnya;
- 3) Menjadi acuan bagi bagian (unit-unit organisasi) dalam mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN RENJA

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan 2025 minimal memuat :

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

- Pengertian Renja, proses penyusunan, kedudukan Renja tahun rencana dengan dokumen Renstra, keterkaitan antara dokumen Renja dengan Renstra dan RPJMD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat peraturan-peraturan yang terkait secara langsung dengan penyusunan Renja SKPD

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja SKPD tahun rencana, kaitannya dengan Renstra, dan isu strategis

1.4. Sistematika Penulisan Renja

Susunan dokumen Renja SKPD terkait pengaturan bab serta garis besar isi bab di dalamnya.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD Tahun Lalu

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Memuat analisis kinerja pelayanan SKPD yang diukur dengan sejumlah indikator, (spt: SPM, IKK, IKU) sesuai dengan target dalam Renstra SKPD.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Memuat kemampuan SKPD dlm melaksanakan program dan kegiatannya, identifikasi realisasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD

Memuat hal-hal kritis terkait pencapaian kinerja SKPD serta masalah dan hambatannya, rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dlm program dan kegiatan prioritas tahun yg direncanakan.

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Tujuan dan Sasaran SKPD

Memuat rumusan tujuan dan sasaran yang mengacu pada Renstra SKPD serta kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran.

3.2. Program dan Kegiatan SKPD

Memuat kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat, serta rumusan program dan kegiatan yang telah memperhatikan RKPD dan Renja KL dengan menjelaskan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan.

BAB IV : PENUTUP

- Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian
- Kaidah pelaksanaan yang memuat arahan Kepala SKPD dalam mempedomani Renja SKPD sebagai acuan untuk penyusunan RKA SKPD
- Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

BADAN KESBANGPOL KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2025

2.1 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN KESBANGPOL KOTA PANGKALPINANG

2.1.1 GAMBARAN KINERJA BADAN KESBANGPOL KOTA PANGKALPINANG

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100- 441 Tahun 2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

Peraturan Walikota Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Menyelenggarakan fungsi membina, memimpin, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan tugas dan fungsi Badan serta mengkoordinasikan kegiatan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang.

2.1.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Pelaksanaan urusan wajib Badan Kesbangpol tahun 2025 secara umum dapat dikatakan telah berjalan dengan baik, walaupun masih ada hal teknis yang perlu mendapat perhatian untuk disempurnakan periode mendatang sehingga pelayanan dasar dapat tercapai. Badan Kesbangpol adalah Perumusan kebijakan di bidang pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Beberapa catatan umum capaian kinerja sepanjang tahun 2025, antara lain :

2.2.1 Bidang Sekretariat

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang ditargetkan 26 orang dan terealisasi 24,44%, dengan dana Rp. 2.647.784.246 dan terealisasi sebesar Rp 647.031.857,-

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah

1. Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang ditargetkan 7 jenis dan terealisasi 0,0%, dengan dana Rp. 2.227.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,-

2. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang ditargetkan 20 set dan terealisasi 0,00%, dengan dana Rp. 1.040.000,- dan terealisasi sebesar Rp. .0.000,-

3. Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor yang ditargetkan 688 jenis dan terealisasi 27,58%, dengan dana Rp. 56.712.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.640.000,-

4. Sub kegiatan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan yang ditargetkan 6 jenis dan terealisasi 0,00%, dengan dana Rp. 25.963.000,- dan terealisasi sebesar Rp0,-

5. Sub kegiatan penyediaan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang ditargetkan 72 kali dan terealisasi 0,00%, dengan dana Rp. 70.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,-

Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

1. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang ditargetkan 26 orang dan terealisasi 0,00%, dengan dana Rp. 41.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0

2. Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang ditargetkan 5 unit dan terealisasi 0,%, dengan dana Rp. 8.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,-

3. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang ditargetkan 7 unit dan terealisasi 10,19%, dengan dana Rp. 201.938.868- dan terealisasi sebesar Rp. 20.575.156,-

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

1. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas jabatan, yang ditargetkan 11 unit dan terealisasi 4,83%, dengan dana Rp. 56.761.696,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.744.308,-
2. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional / lapangan, yang ditargetkan 11 unit dan terealisasi 5,61%, dengan dana Rp. 48.931.696,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.744.308,-

2.2.2 Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantaapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang ditargetkan 3 lap dan terealisasi 0,00%, dengan dana Rp. 379.065.000 dan terealisasi sebesar Rp. 0,-
2. Pembentukan Paskibraka yang ditargetkan 36 orang dan terealisasi 0,89%, dengan dana Rp. 989.594.000 dan terealisasi sebesar Rp. 8.820.000

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahann Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantaapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

1. Sub kegiatan pelaksanaan Kebijakandi bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang ditargetkan 12 lap dan terealisasi 1,85%, dengan dana Rp. 145.031.696 dan terealisasi sebesar Rp 2.689.308-
2. Sub kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang ditargetkan 1 lap dan terealisasi 83,33%, dengan dana Rp. 120.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 100.000.000,-

2.2.3 Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Program Peningkatan Peran Partai politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantaapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situsasi politik

1. Sub kegiatan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala dearah serta pemantauan situasi politik di daerah yang ditargetkan 60 rekomendasi dan terealisasi 0,03%, dengan dana Rp. 26.763.539.600 dan terealisasi sebesar Rp 8.400.000,-

2. Sub kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah yang ditargetkan 9 dok dan terealisasi 0,00%, dengan dana Rp. 88.530.000 dan terealisasi sebesar Rp. 0,-
3. Sub kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah yang ditargetkan 4 lap dan terealisasi 11,69%, dengan dana Rp. 27.271.696,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.189.308,-

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantaapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

1. Sub kegiatan koordinasi di bidang pendataan Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah yang ditargetkan 60 ormas dan terealisasi 11,27%, dengan dana Rp. 31.171.696 dan terealisasi sebesar Rp. 3.514.308,-

2.2.4 Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantaapan pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial

1. Sub kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah yang ditargetkan 12 lap dan terealisasi 8,06%, dengan dana Rp. 305.386.288 dan terealisasi sebesar Rp. 24.600.000
2. Sub kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah yang ditargetkan 12 lap dan terealisasi 0,00%, dengan dana Rp. 85.406.112 dan terealisasi sebesar Rp. 0
3. Sub kegiatan pelaksanaan Forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten / kota yang ditargetkan 12 lap dan terealisasi 0,00%, dengan dana Rp. 156.794.300 dan terealisasi sebesar Rp. 0

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan TUPOKSI SKPD

Salah satu faktor dan aktor utama terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah performa atau postur birokrasi yang mapan dan responsif, karena dalam posisi dan perannya yang begitu strategis maka dalam konteks sistem administrasi negara,

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang ditopang oleh aparatur yang profesional akan melahirkan model penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan bersih serta berorientasi kepada kinerja dan hasil.

Tugas pokok dan fungsi sangat diperlukan sebagai acuan untuk mencapai sasaran yang diinginkan agar tidak terjadi tumpang tindih di dalam memberikan *output* kepada kelompok sasaran secara menyeluruh. Berkenaan dengan sasaran dan target yang tercantum dalam RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 yang juga menjadi bagian dalam representasi visi dan misi kepala daerah serta rencana strategis SKPD (RENSTRA SKPD), maka pemahaman Tupoksi yang dimiliki oleh masing-masing SKPD dan aparatur pelaksanaanya sebagai ujung tombak didalam pencapaian target yang telah ditetapkan merupakan hal yang sangat penting.

Dalam kaitan tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah (OPD) telah menggarisbawahi akan pentingnya tugas, pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah sebagai titik sentral di dalam menjalankan fungsi-fungsi layanan publik yang amanah dan berkesinambungan sesuai dengan Rencana kerja (Renja) SKPD yang telah dibuat.

Implementasi pelayanan publik dalam lingkup Administrasi Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan dalam rangka pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dengan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang ada oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang.

Salah satu unsur penyelenggaraan pemerintah yang perlu mendapat perhatian dalam upaya reformasi ialah penataan aparatur pemerintah yang meliputi penataan kelembagaan birokrasi pemerintahan, system, dan penataan manajemen sumber daya pegawai (PNS) termasuk tugas pokok dan fungsi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut:

a. Tujuan

Adapun tujuannya adalah :

Meningkatkan Indeks Demokrasi

b. Indikator Tujuan

Indeks Demokrasi

Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

a. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai adalah :

Terselesainya kasus perselisihan

b. Indikator Sasaran

Persentase kasus perselisihan antar umat beragama, antar suku bangsa, ras dan antar golongan yang diselesaikan

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa
da Politik Kota Pangkalpinang**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	2024	2025	2026
Meningkatkan Indeks Demokrasi		Indeks Demokrasi	Nilai	74,80	75,00	75,15
	Terselesainya kasus perselisihan	Persentase kasus perselisihan anatar umat beragama, antar suku bangsa, ras dn antar golongan yang diselesaikan	%	100%	100%	100%

3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

❖ **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Indikator : Jumlah dokumen Renstra / Renja
2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD
 - Indikator : Jumlah dokumen RKA - SKPD
3. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Indikator : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kegiatan Administarsi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan
 - Indikator : Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Indikator : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD

- Indikator : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Indikator : Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Sesuai Tupoksi
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (PDH)
 - Indikator : Jumlah Pakaian Dinas yang di Buat (dipesan)

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - Indikator ; Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Indikator : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Indikator : Jumlah Bahan Logistic Kantor yang Tersedia
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Indikator : Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang di Sediakan
5. Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Indikator : Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Indikator : Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani
2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - Indikator : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki
3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

- Indikator : Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan

- Indikator : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan

Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan

Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

- Indikator : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan

2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

- Indikator : Jumlah Rapat Pokja Revolusi Mental

3. Pelaksanaan Monitoring di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

- Indikator : Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Bela Negara Bagi Kader PKK dan Bagi Para Pelajar

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah
 - Indikator : Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Tim Terpadu
2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah
 - Indikator : Jumlah Laporan Koordinasi Kewaspadaan Dini di Daerah
3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah
 - Indikator : Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Orang Asing (WNA)
4. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik Di Daerah
 - Indikator : Jumlah Pelaksanaan Kegiatan FORKOPIMDA

**Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan**

Sub Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

Kegiatan :

1. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendataan Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah
- Indikator : Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan Ormas

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik.

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Indikator : Jumlah Dokumen Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah PARPOL
2. Pelaksanaan Monitoring di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Indikator : Jumlah Laporan Perkembangan Politik

3. Penyusunan Perumusan Bahan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

- Indikator : Jumlah Rekomendasi Diskusi Politik

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah
 - Indikator : Jumlah Pelaksanaan Kegiatan FKUB
2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - Indikator : Jumlah Laporan Monitoring

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan pendanaan perangkat daerah dalam bentuk uraian. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sementara itu kegiatan perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang di laksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Selanjutnya di sajikan secara rinci rencana program, kegiatan dan pendanaan Perangkat Daerah selama kurun satu tahun. Dalam tabel tersebut, masing – masing tujuan, sasaran, program dan kegiatan di lengkapi dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

1. Indikator Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
2. Indikator Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
3. Indikator Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin di ubah berupa hasil pembangunan/layanan yang di peroleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Indikator tujuan dan sasaran yang di pilih idealnya adalah pada skala Indikator Dampak (*impact*) minimal Hasil (*outcome*). Indikator program yang dipilih idealnya pada skala Hasil (*outcome*), dan untuk indikator kegiatan yang di pilih idealnya adalah pada skala Keluaran (*output*).

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Rencana program dan kegiatan tahun 2024 - 2026, sebagai berikut :

Urusan Pemerintahan Umum

Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Administrasi Umum

- a. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- b. penyediaan jasa administrasi keuangan
- c. penyediaan jasa kebersihan kantor

- d. penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja
- e. penyediaan alat tulis kantor
- f. penyediaan cetak dan penggandaan
- g. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- h. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
- i. penyediaan makanan dan minuman
- j. rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- k. pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- l. pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
- m. penyediaan alat perlengkapan kantor
- n. pembuatan dan pengelolaan website
- o. Penyediaan jasa surat menyurat
- p. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Pns
- q. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
- r. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
- s. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- t. Penyediaan peralatan rumah tangga
- u. Penyediaan bahan logistic kantor
- v. Pengadaan mobil jabatan
- w. Pengadaan kendaraan dinas / operasional
- x. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas
- y. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- z. Pengadaan peralatan rumah jabatan / dinas
- aa. Pengadaan peralatan gedung kantor
- bb. Pengadaan mebeleur
- cc. Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan
- dd. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas
- ee. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- ff. Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan
- gg. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
- hh. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan perlengkapan rumah jabatan / dinas
- ii. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan gedung kantor
- jj. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan rumah jabatan / dinas
- kk. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

- ll. Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur
 - mm. Rehabilitasi sedang / berat rumah jabatan
 - nn. Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas
 - oo. Rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantor
 - pp. Rehabilitasi sedang / berat mobil jabatan
 - qq. Rehabilitasi sedang / berat kendaraan dinas / operasional
2. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- Kegiatan Administrasi Keuangan**
- a. penyusunan laporan keuangan semesteran
 - b. penyusunan laporan keuangan akhir tahun
 - c. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - d. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
 - e. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - f. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - g. Penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi
 - h. Penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan
 - i. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
3. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
- a. penyusunan RENJA (RKT,RKA dan DPA)
 - b. penyusunan SPIP
 - c. Penyusunan renstra dan renja perangkat daerah
 - d. Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan
 - e. Penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah
 - f. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah
 - g. Evaluasi kinerja perangkat daerah
4. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- Kegiatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
- a. pendidikan dan pelatihan formal
 - b. Pengadaan mesin / kartu absensi
 - c. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - d. Pengadaan pakaian kerja lapangan
 - e. Pengadaan pakaian korpri
 - f. Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu

- g. Pemulangan pegawai yang pensiun
 - h. Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
 - i. Pemindahan tugas ASN
 - j. Sosialisasi peraturan perundang – undangan
 - k. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan
5. **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
 - c. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
 - d. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
6. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial**
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
- a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah
 - b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah

- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
7. **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- a. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat eragama dan penghayat kepercayaan di daerah
 - b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat eragama dan penghayat kepercayaan di daerah
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat eragama dan penghayat kepercayaan di daerah
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat eragama dan penghayat kepercayaan di daerah
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat eragama dan penghayat kepercayaan di daerah
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
8. **Program Peningkatan Peran Partai dan Lembaga Pendidikan Politik Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Poitik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah sertaPemantauan Situasi Politik

- a. Penysunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya poilitki, peningkatan demokrasi, faslitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah
 - b. Penysunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya poilitki, peningkatan demokrasi, faslitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya poilitki, peningkatan demokrasi, faslitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya poilitki, peningkatan demokrasi, faslitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelapoaran di bidang pendidikan politik, etika budaya poilitki, peningkatan demokrasi, faslitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
9. **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**
- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**
- a. Penyusunan program kerja di bidang pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah
 - b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Restra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							8.434.811.493,00	7.251.157.894,00	32.509.551.684,10							10.895.462.600,00	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							8.434.811.493,00	7.251.157.894,00	32.509.551.684,10							10.895.462.600,00	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							8.434.811.493,00	7.251.157.894,00	32.509.551.684,10							10.895.462.600,00	
1	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah				74,3085 Nilai Nilai	74,3085 Nilai Nilai	4.374.532.793,00	3.160.809.506,00	3.378.758.840,10							6.096.500.000,00	
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya laporan keuangan Perangkat Daerah SAP	-			100 %	100 %	3.585.011.293,00	2.647.784.246,00	2.647.784.246,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		5.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		1	1	09	09																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semudakamata, Semudesa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan				100 %	100 %	1.603.449.000,00	1.368.659.000,00	1.521.895.278,00							2.100.000.000,00	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Nilai - Nilai Wawasan Kebangsaan	-			100 %	100 %	1.603.449.000,00	1.368.659.000,00	1.368.659.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		2.100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2.00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		

		1	2	01	03																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				2200 Orang	2200 Orang	411.869.000,00	379.065.000,00	246.549.000,00	Kota Pangkal Pinang, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka																	
							Jumlah Paskibraka				36 Orang	36 Orang	1.191.580.000,00	989.594.000,00	1.275.346.278,00	Kota Pangkal Pinang, Sumatera Kecamatan, Sumatera KeL	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA	Persentase Peningkatan Pembinaan Serta Pendidikan Politik Bagi Partai Politik				100 %	100 %	1.927.441.600,00	1.877.899.296,00	26.856.841.296,00							1.958.962.600,00	

						PENDIDIK AN MELALUI PENDIDIK AN POLITIK DAN PENGEMB ANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK																		
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Persentase Pencairan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik	-			100 %	100 %	1.927.441.600,00	1.877.899.296,00	1.877.899.296,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-			1.958.962.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

						Pemantau an Situasi Politik																		
	8	0 1	0 3	2. 0 1	00 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
						Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah n, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemil ihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Doku men	1 Doku men	1.848.96 2.600,00	1.835.91 2.600,00	26.756.03 9.600,00	Kota Pangk al Pinan g, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN TRANS FER Pendap atan dari Penge mbalia n Sisa Dana Akibat Tidak Tercap ainya Capaia n Target Kinerja dan Sisa Dana Pengel uaran Pembia yaan Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Aksel erasi Refor masi Birok rasi dan Dem okras i Daer ah			1.848.962.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	0 1	0 3	2. 0 1	00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
						Jumlah				50	50	44.850.0	14.715.0	73.530.00	-	PENDA	-	Aksel			60.000.000,00	BADAN		

							Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				Orang	Orang	00,00	00,00	0,00		PATAN TRANSFER		erasi Refor masi Birok rasi dan Dem okras i Daer ah					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan				1 Laporan	1 Laporan	33.629.000,00	27.271.696,00	27.271.696,00	Kota Pangkal Pinang, Semu a Keca mata n, Semu	PENDA PATAN TRANSFER	-	Aksel erasi Refor masi Birok rasi dan Dem okras i Daer			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		

							Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									a Kel/D esa			ah					
4	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/LSM yang di Berdayakan dan di Awasi				30 %	30 %	33.629.000,00	31.171.696,00	31.171.696,00								40.000.000,00	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	-			30 %	30 %	33.629.000,00	31.171.696,00	31.171.696,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-			40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
							Jumlah				18	18	33.629.0	31.171.6	31.171.69	Kota	PENDA	-	Aksel				40.000.000,00	BADAN

							Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				Orang	Orang	00,00	96,00	6,00	Pangkal Pinang, Semuala Kecamatan, Semuala Kel/Desa	PATAN TRANSFER		erasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Peningkatan Kewaspadaan dan Pencegahan Narkoba				80 %	80 %	177.050.000,00	265.031.696,00	231.411.696,00								200.000.000,00	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan	Jumlah Laporan Monitoring	-			4 Laporan	4 Laporan	177.050.000,00	265.031.696,00	265.031.696,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi	-			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

						n Ekonomi, Sosial dan Budaya											Daer ah					
	8	0 1	0 5	2. 0 1	00 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalaguna an Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				80 Orang	80 Orang	57.050.0 00,00	145.031. 696,00	121.411.6 96,00	Kota Pangk al Pinan g, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN TRANS FER	-	Aksel erasi Refor masi Birok rasi dan Dem okras i Daer ah			60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0 1	0 5	2. 0 1	00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalaguna an Narkotika, Fasilitas				100 Orang	100 Orang	120.000. 000,00	120.000. 000,00	110.000.0 00,00	Kota Pangk al Pinan g, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN TRANS FER	-	Aksel erasi Refor masi Birok rasi dan Dem okras i Daer ah			140.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

							Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																
6	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Gangguan atau Konflik yang Tertangani				100 %	100 %	318.709.100,00	547.586.700,00	489.472.878,00							500.000.000,00	
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar	-			100 %	100 %	318.709.100,00	547.586.700,00	547.586.700,00		-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-			500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

							Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah																
	8	0	0	2.	00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				50 Orang	50 Orang	63.442.7 00,00	85.406.1 12,00	75.406.11 2,00	Kota Pangk al Pinan g, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN TRANSFER	-	Aksel erasi Refor masi Birok rasi dan Dem okras i Daer ah				100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2.	00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	
						Jumlah				100	100	219.644.	305.386.	307.272.4	Kota	PENDA	-	Aksel				250.000.000,00	BADAN

							Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				Orang	Orang	500,00	288,00	66,00	Pangkalan Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PATAN TRANSFER		erasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2.	00	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	35.621.900,00	156.794.300,00	106.794.300,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah				150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
												J U M L A H	8.434.811.493,00	7.251.157.894,00	32.509.551.684,10								10.895.462.600,00	

BAB V

PENUTUP

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional, dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rencana kerja dalam koridor perencanaan merupakan instrumen utama yang harus dikedepankan mengingat dokumen tersebut adalah dokumen dasar dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang diharapkan dapat memberikan gambaran singkat dari program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen renstra. Semua Program dan Kegiatan yang disajikan dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang Tahun 2025 adalah merupakan pokok pikiran dan rumusan skala prioritas yang mungkin dapat diupayakan dilaksanakan dengan mempertimbangkan semua program dan kegiatan.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 disusun sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan untuk dapat diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Pangkalpinang, Mei 2025

KEPALA BADAN KESBANGPOL
KOTA PANGKALPINANG

DONAL TAMPUBOLON, AP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19750522 199311 001

TABEL RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2024 - 2025

Kode					Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Tahun 2024		Tahun 2025		
											Tahun 2018	Target	Rp	Target	Rp
8	01				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya penyampaian laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah tepat waktu	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		%		100	3,660,969,689	100	3,972,118,220	
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja disusun Tepat Waktu dibagi Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dikali 100%	%		100	200,000	100	200,000	
8	01	01	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen		1	50,000	1	50,000	
8	01	01	2.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen		1	50,000	1	50,000	
8	01	01	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKPJ, LPPD dan LKPJ Akhir Masa Jabatan		Dokumen		1	50,000	1	50,000	
8	01	01	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan		1	50,000	1	50,000	

8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan yang Tertangani dibagi Jumlah Layanan Administrasi Keuangan yang di Anggarkan dikali 100%	%		100	3,142,022,115	100	3,299,118,220	
8	01	01	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/bulan		38	3,141,922,115	38	3,299,018,220	
8	01	01	2.02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan		1	50,000	1	50,000	
8	01	01	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Laporan		1	50,000	1	50,000	
8	01	01	2.09		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik dibagi Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dikali 100%	%		90	145,799,800	90	175,000,000	
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit		11	145,799,800	11	175,000,000	
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit		11	145,799,800	11	175,000,000	
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Memenuhi Standart Kompetensi / Kualifikasi Pada Unit Kerjanya	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian yang Tertangani dibagi Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian yang di Anggarkan dikali 100%	%		100	28,000,000	100	25,000,000	
8	01	01	2.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang		24	-	5	25,000,000	
8	01	01	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket		40	28,000,000	40	-	
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang Tertangani dibagi Jumlah Layanan Administrasi Umum yang di Anggarkan dikali 100%	%		100	76,961,284	100	189,000,000	
8	01	01	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket		1	2,102,177	7	4,000,000	

8	01	01	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket		1	640,000	20	80,000,000	
8	01	01	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket		4	35,823,650	688	40,000,000	
8	01	01	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket		1	14,195,400	6	15,000,000	
8	01	01	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan		1	24,200,057	75	50,000,000	
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Penyediaan Jasa	Jumlah Layanan terpenuhi dibagi Layanan jasa yang dibutuhkan dikali 100%	%		100	267,986,490	100	283,800,000	
8	01	01	2.08	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan		12	58,800,000	38	58,800,000	
8	01	01	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan		1	5,328,040	5	15,000,000	
8	01	01	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan		3	203,858,450	7	210,000,000	
8	01	02			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan		%		85	128,396,500	100	390,000,000	
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Nilai - Nilai Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta yang Mengikuti dibagi Jumlah Penduduk yang Mengikuti dikali 100%	%		85	128,396,500	100	390,000,000	
8	01	02	2.01	003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Orang		1	128,396,500	1	300,000,000	
8	01	02	2.01	002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		Dokumen		3	-	3	50,000,000	
8	01	02	2.01	005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Laporan		1	-	1	40,000,000	

8	01	02	2.01	006	Pembentukan Paskibraka	Terlaksananya Pembentukan Paskibraka di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Paskibraka		Orang		36					
8	01	06			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Dapat di Selesaikan		%		100	146,595,200	100	420,000,000		
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Koordinasi Kewaspadaan Dini di Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti dibagi Jumlah Penduduk yang Mengikuti dikali 100%	%		100	146,595,200	100	420,000,000		
8	01	06	2.01	003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Orang		1	60,200,000	1	80,000,000		
8	01	03	2.01	004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Orang		12	86,395,200	12	90,000,000		
8	01	03	2.01	005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Laporan		1	-	1	50,000,000		
8	01	03	2.01	002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		Dokumen		1	-	1	200,000,000		

8	01	04			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ORMAS yang terdata	Jumlah Ormas yang Memenuhi Persyaratan dibagi Jumlah Ormas yang Terdata dikali 100%	%		20	31,398,400	30	50,000,000	
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ORMAS yang terdata		%		20	31,398,400	30	50,000,000	
8	01	04	2.01	005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Laporan		0	-	0	-	
8	01	04	2.01	004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Orang		1	31,398,400	1	50,000,000	
8	01	03			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Terlaksananya Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik	Jumlah Peserta yang Melakukan Pendidikan Politik dibagi Jumlah Partai Politik yang Menerima Bantuan Partai Politik dikali 100%	Laporan		30	1,505,602,550	30	1,589,454,150	
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Perkembangan Politik		laporan		30	1,505,602,550	30	1,589,454,150	
8	01	03	2.01	005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Laporan		4	21,498,400	4	50,000,000	

8	01	03	2.01	003	<i>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Orang		450	1,349,454,150	450	1,349,454,150	
8	01	03	2.01	002	<i>Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		Dokumen		1	-	1	40,000,000	
8	01	03	2.01	004	<i>Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Laporan		4	134,650,000	4	150,000,000	
8	01	05			Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	Jumlah Parameter DIEKOSOSBUD dibagi Jumlah Parameter di Buku Laporan dikali 100%	Laporan		12	279,628,400	12	460,000,000	
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah laporan monitoring		laporan		12	279,628,400	12	460,000,000	
8	01	05	2.01	004	<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Orang		4	-	4	120,000,000	
8	01	05	2.01	005	<i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>		Laporan		12	29,628,400	12	90,000,000	

8	01	05	2.01	003	Pelaksanaan kebijakann di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tertaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Laporan		12	250,000,000	12	250,000,000	
					TOTAL							5,752,590,739		6,881,572,370	

TRIWULAN I
Evaluasi Terhadap Hasil Re
Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik I

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada 1			
							I		II	
							K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	-	080101	P R O G R A M P E N U N J A N G U R U S A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H K A B U P A T E N / K O T A	Indeks Kepuasan Pelaya nan Internal Perangkat Daerah (D e n g a n Satuan:Nilai)	85	3,160,809,506	30	688,735,629	0	0
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah (D e n g a n Satuan:Nilai)	74.3		75.5			
2		080101202	A d m i n i s t r a s i K e u a n g a n P e r a n g k a t D a e r a h	P e r s e n t a s e t e r s u n n y a l a p o r a n k e u a n g a n P e r a n g k a t D a e r a h S A P (D e n g a n Satuan:%)	100	2,647,784,246	26	647,031,857	0	0
3		080101202001	P e n y e d i a a n G a j i d a n T u n j a n g a n A S N	J u m l a h O r a n g y a n g M e m e r i m a G a j i d a n T u n j a n g a n A S N (D e n g a n Satuan:Orang/bulan)	26	2,647,784,246	26	647,031,857		
4		080101206	A d m i n i s t r a s i U m u m P e r a n g k a t D a e r a h	P e r s e n t a s e P e l a k s a n a a n A d m i n i s t r a s i U m u m P e r a n g k a t D a e r a h (D e n g a n Satuan:%)	100	155,943,000	1	15,640,000	0	0
5		080101206001	P e n y e d i a a n K o m p o n e n I n s t a l a s i L i s t r i k / P e n e r a n g a n B a n g u n a n K a n t o r	J u m l a h P a k e t K o m p o n e n I n s t a l a s i L i s t r i k / P e n e r a n g a n B a n g u n a n K a n t o r y a n g D i s e d i a k a n (D e n g a n Satuan:Paket)	1	2,227,300				
6		080101206002	P e n y e d i a a n P e r a l a t a n d a n P e r l e n g k a p a n K a n t o r	J u m l a h P a k e t P e r a l a t a n d a n P e r l e n g k a p a n K a n t o r y a n g D i s e d i a k a n (D e n g a n S a t u a n : P a k e t)	1	1,040,000				
7		080101206004	P e n y e d i a a n B a h a n L o g i s t i k K a n t o r	J u m l a h P a k e t B a h a n L o g i s t i k K a n t o r y a n g D i s e d i a k a n (D e n g a n S a t u a n : P a k e t)	4	56,712,700	1	15640000		
8		080101206005	P e n y e d i a a n B a r a n g C e t a k a n d a n P e n g g a n d a a n	J u m l a h P a k e t B a r a n g C e t a k a n d a n P e n g g a n d a a n y a n g D i s e d i a k a n (D e n g a n Satuan:Paket)	1	25,963,000				
9		080101206009	P e n y e l e n g g a r a a n R a p a t K o o r d i n a s i d a n K o n s u l t a s i S K P D	J u m l a h L a p o r a n P e n y e l e n g g a r a a n R a p a t K o o r d i n a s i d a n K o n s u l t a s i S K P D (D e n g a n Satuan:Laporan)	1	70,000,000				
12		080101208	P e n y e d i a a n J a s a P e n u n j a n g U r u s a n P e m e r i n t a h a n D a e r a h	P e r s e n t a s e T e r l a k s a n a n y a J a s a P e n u n j a n g U r u s a n P e m e r i n t a h a n D a e r a h (D e n g a n S a t u a n : %)	100	251,388,868	1	20,575,156	0	0
13		080101208002	P e n y e d i a a n J a s a K o m u n i k a s i , S u m b e r D a y a A i r d a n L i s t r i k	J u m l a h L a p o r a n P e n y e d i a a n J a s a K o m u n i k a s i , S u m b e r D a y a A i r d a n L i s t r i k y a n g D i s e d i a k a n (D e n g a n S a t u a n : L a p o r a n)	1	41,200,000				
14		080101208003	P e n y e d i a a n J a s a P e r a l a t a n d a n P e r l e n g k a p a n K a n t o r	J u m l a h L a p o r a n P e n y e d i a a n J a s a P e r a l a t a n d a n P e r l e n g k a p a n K a n t o r y a n g D i s e d i a k a n (D e n g a n S a t u a n : L a p o r a n)	1	8,250,000				

15		080101208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	3	201,938,868	1	20,575,156		
16		080101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:%)	85	105,693,392	2	5,488,616	0	0
17		080101209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	56,761,696	1	2,744,308		
18		080101209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	3	48,931,696	1	2,744,308		

19	-	080102	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (Dengan Satuan:%)	100	1,368,659,000	1	8,820,000		0
20		080102201	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Nilai - Nilai Wawasan Kebangsaan (Dengan Satuan:%)	100	1,368,659,000	1	8,820,000		0
21		080102201003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Dengan Satuan:Orang)	2,200	379,065,000				
22		080102201008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka (Dengan Satuan:Orang)	36	989,594,000	36	8,820,000		

23	-	080103	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Pembinaan Serta Pendidikan Politik Bagi Partai Politik (Dengan Satuan:%)	100	1,865,342,600	6	11,589,308		0
24		080103201	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pencairan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik (Dengan Satuan:%)	100	1,865,342,600	6	11,589,308		0

25		080103201002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1,835,912,600	1	8,400,000		
26		080103201004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	50	14,715,000				
27		080103201005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	14,715,000	1	3,189,308		

28	-	080104	P R O G R A M PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/LSM yang di Berdayakan dan diawasi (Dengan Satuan:%)	20	31,171,696	12	3,514,308		0
29		080104201	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas (Dengan Satuan:%)	30	31,171,696	12	3,514,308		0
30		080104201004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	18	31,171,696	18	3,514,308		

31	-	080105	P R O G R A M PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Peningkatan Kewaspadaan dan Pencegahan Narkotika (Dengan Satuan:%)	80	265,031,696	40	102,689,308		0
32		080105201	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Monitoring (Dengan Satuan:Laporan)	4	265,031,696	1	102,689,308		0

33		080105201003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	80	145,031,696	20	2689308		
34		080105201005	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	100	120,000,000	80	100000000		
35	-	080106	P R O G R A M P E N I N G K A T A N K E W A S P A D A A N N A S I O N A L D A N P E N I N G K A T A N K U A L I T A S D A N F A S I L I T A S I P E N A N G A N A N K O N F L I K S O S I A L	Persentase Gangguan atau Konflik yang Terjadi (Dengan Satuan:%)	100	547,586,700	6	24,600,000		0
36		080106201	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Koordinasi Kewaspadaan Dini di Daerah (Dengan Satuan:%)	75	547,586,700	6	24,600,000		0
				Persentase Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Dengan Satuan:%)	100					
37		080106201003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	50	85,406,112				
38		080106201004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	100	305,386,288	100	24,600,000		
39		080106201006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	2	156,794,300				

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DA	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:	
Dievaluasi Kota Pangkalpinang, tanggal 07-02-2025 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA F Donal Tampubolon, AP., M.Si. NIP.19750522199	

enja
 Kota Pangkalpinang Tahun 2025

Triwulan tahun 2025				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
III		IV							
9		10		11		12		13	
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
0	0	0	0	30.000	688,735,629	35.294	21.790	SEKRETARIS (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	
				75.500		102		SEKRETARIS (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	
0	0	0	0	26.000	647,031,857	26.000	24.437	SUB BAGIAN PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN	
				26	647,031,857	100	24.437	SUB BAGIAN PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN	
0	0	0	0	1.000	15,640,000	1.000	10.029	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				0	0	0	0.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				0	0	0	0.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				1	15,640,000	25	27.578	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				0	0	0	0.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				0	0	0	0.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
0	0	0	0	1.000	20,575,156	1.000	8.185	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				0	0	0	0.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				0	0	0	0.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

				1	20,575,156	33	10.189	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
0	0	0	0	2.000	5,488,616	2.353	5.193	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				1	2,744,308	100	4.835	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				1	2,744,308	33	5.608	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)						68.455	21.790	
PREDIKAT KINERJA								
	0		0	1.000	8,820,000	1.000	0.644	BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA
	0		0	1.000	8,820,000	1.000	0.644	SUB KOORDINATOR IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN
				0	0	0	0.000	SUB KOORDINATOR IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN
				36	8,820,000	100	0.891	SUB KOORDINATOR IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)						1.000	0.644	
PREDIKAT KINERJA								
	0		0	6.000	11,589,308	6.000	0.621	BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
	0		0	6.000	11,589,308	6.000	0.621	SUB KOORDINATOR POLITIK DALAM NEGERI

				1	8,400,000	100	0.458	SUB KOORDINATOR POLITIK DALAM NEGERI
				0	0	0	0.000	SUB KOORDINATOR POLITIK DALAM NEGERI
				1	3,189,308	100	21.674	SUB KOORDINATOR POLITIK DALAM NEGERI
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)						6.000	0.621	
PREDIKAT KINERJA								
	0		0	12.000	3,514,308	60	11.274	BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
	0		0	12.000	3,514,308	40	11.274	SUB KOORDINATOR ORGANISASI KEMASYARAKATAN
				18	3,514,308	100	11.274	SUB KOORDINATOR ORGANISASI KEMASYARAKATAN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)						60.000	11.274	
PREDIKAT KINERJA								
	0		0	40.000	102,689,308	50	38.746	BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA
	0		0	1	102,689,308	25	38.746	SUB KOORDINATOR KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN

				20	2,689,308	25	1.854	SUB KOORDINATOR KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN
				80	100,000,000	80	83.333	SUB KOORDINATOR KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)						50.000	38.746	
PREDIKAT KINERJA								
	0	0	0	6.000	24,600,000	6	4.492	B I D A N G K E W A S P A D A A N NASIONAL DAN P E N A N G A N A N KONFLIK
	0	0	0	6	24,600,000	8	4.492	SUB KOORDINATOR KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN
				0		0		SUB KOORDINATOR KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN
				0	0	0	0.000	SUB KOORDINATOR KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN
				100	24,600,000	100	8.055	SUB KOORDINATOR KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN
				0	0	0	0.000	SUB KOORDINATOR KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					6.000	4.492	
PREDIKAT KINERJA							
LN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)					31.909	12.928	
PREDIKAT KINERJA							